

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK  
KECURANGAN (*FRAUD*) DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**( FACTORS THAT INFLUENCE THE OCCURRENCE OF FRAUD IN  
REGIONAL WORK UNITS BANTUL )**

<sup>1</sup>Afif Nashrulloh

<sup>2</sup>Melvin Rahma Sayuga Subroto

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

<sup>2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

[afifnashrulloh@student.unu-jogja.ac.id](mailto:afifnashrulloh@student.unu-jogja.ac.id)

[\\*melvinrahma@unu-jogja.ac.id](mailto:*melvinrahma@unu-jogja.ac.id)

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian ini menggunakan responden penelitian para pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, keefektifan pengendalian internal, penegakkan hukum, budaya organisasi dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Model (SEM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh keefektifan pengendalian internal, penegakkan hukum, budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

**Kata kunci/ Keywords:** *Fraud, pemerintahan, tekanan, kesempatan, rasionalisasi.*

**ABSTRACT**

*This study aims to explore the perceptions of employees regarding the factors that influence the occurrence of fraud in the government sector. This study uses research respondents who are employees who work at the Department of Education. The sampling technique in this study used purposive sampling. This research uses quantitative methods. The variables used in this study are the suitability of compensation, procedural fairness, the effectiveness of internal controls, law enforcement, organizational culture and organizational commitment. This research uses the Structural Equation Model (SEM) analysis tool or structural equation model.*

*The results of the study show that there is an effect of suitability of compensation and procedural justice on the occurrence of fraud in the government sector. There is no effect of the effectiveness of internal control, law enforcement, organizational culture and organizational commitment on the occurrence of fraud in the government sector.*

**Key words:** *Fraud, government, pressure, opportunity, rationalization.*

## PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindak penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan dengan cara sengaja oleh seorang atau kelompok untuk keuntungan dan salah saji material sehingga pihak lain dirugikan. Menurut Najahningrum, (2013) dalam ilmu akuntansi, kecurangan (*fraud*) adalah suatu hal yang menyimpang dari proses akuntansi yang sudah ditentukan untuk dijalankan dalam suatu organisasi. *Statement of Auditing Standart* No.99 mendeskripsikan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan laporan keuangan yang salah saji. Menurut (Susandra & Hartina, 2017) Salah saji material tersebut dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan oleh stakeholder dan pihak penggunaanya.

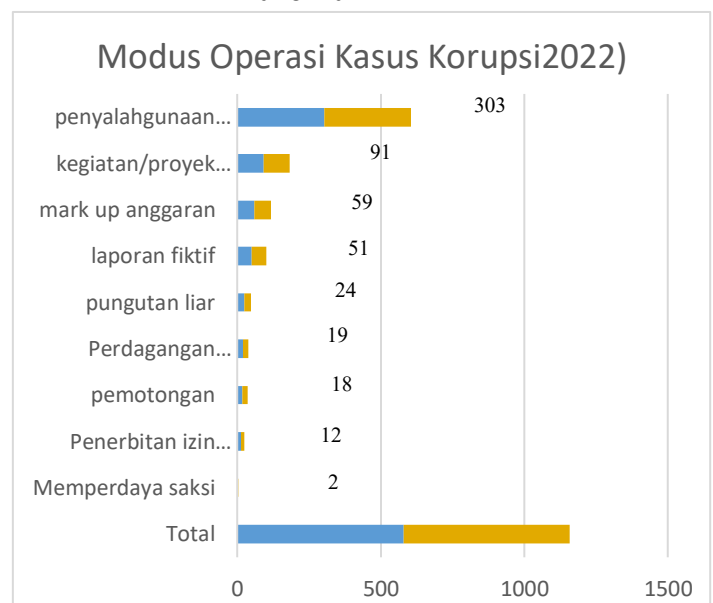
Indikasi kecurangan ditemukan diberbagai sektor, dari sektor pemerintah, sektor sosial atau swasta. Kecurangan (*Fraud*) di sektor pemerintah lebih sering terjadi karena sistem pengelolaan keuangan yang bersifat sentralisasi. Menurut IAI dalam Hayani, (2021) tindak kecurangan akuntansi (*Fraud*) pada sektor pemerintahan ini sering berkaitan dengan tindak kasus korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang biasanya dilakukan yaitu pemalsuan catatan, peniadaan dokumen, dan *mark-up* (peningkatan) yang menyebabkan kerugian.

Permasalahan terkait penyimpangan pengelolaan anggaran termasuk dalam kasus tindak korupsi yang paling banyak. Tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur, karena sektor ini memiliki persentasi alokasi anggaran yang dominan lebih besar. Modus yang biasanya terjadi adalah

mark up, proyek fiktif dan laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan (Hukum et al., 2023).

Sepanjang tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) telah berhasil menghimpun dan menemukan sebanyak 579 kasus tindak pidana korupsi yang sudah diselesaikan oleh pihak berwenang (Hukum et al., 2023). Menurut ICW jumlah tersangka yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.396 orang dengan bermacam latar belakang profesinya. Sementara besar kerugian yang berhasil diungkapkan adalah sekitar Rp 42,747 triliun. Berdasarkan data terakait kasus korupsi yang telah terjadi sejumlah besar pelakunya adalah pejabat atau pegawai pemerintahan.

Gambar 1.1 Grafik Catatan Korupsi Tahun 2018-2022



“Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (ICW)”

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam grafik pemetaan kasus korupsi berdasarkan modus operandi sepanjang tahun 2022 yang paling dominan digunakan adalah modus penyalahgunaan anggaran. Modus korupsi lainnya yang digunakan pelaku diantaranya adalah proyek palsu, penggelembungan dana dan laporan palsu. Ketiga modus tersebut biasa

digunakan pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah (Hukum et al., 2023).

Kasus tindak korupsi yang terjadi di pemerintahan sangat merugikan negara di bidang perekonomian. Berdasarkan instansinya paling banyak kasusnya adalah SKPD sebanyak 548 kasus. Hal ini menggambarkan lemahnya pengawasan dan kuatnya faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kecurangan (*fraud*) (kpk.go.id tahun 2022).

Kasus penyimpangan berupa penyalahgunaan anggaran keuangan yang terjadi di pemerintahan dapat terjadi pada level dan sistem pemerintahan manapun, bahkan hal itu terjadi sampai sekarang. Salah satu penyimpangan yang terjadi baru ini adalah terkait kasus penyalahgunaan anggaran keuangan untuk pengadaan peralatan dan jasa kebersihan Stadion Sultan Agung (SSA) Kabupaten Bantul. Dugaan kasus korupsi anggaran ini mencapai total Rp 800 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021 dengan modus menggunakan nota kosong atau nota fiktif. Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitor Peradilan JCW (*Jogja Corruption Watch*) Baharudin Kamba menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat permohonan kepada KPK agar bisa menangani dengan maksud agar kasus ini segera ditangani dan perlunya ada pengawasan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (radarjogja.jawapos.com).

Kasus korupsi dana perawatan atau pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Perkembangan kasus tersebut sudah ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).

Tersangka adalah seorang ASN dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bantul. Adapun tersangka sebelumnya menjabat sebagai Sub. Koordinator Kelompok Substansi Kepemudaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bantul. Dugaan tindak korupsi tersebut dengan nota fiktif senilai Rp 170,9 juta dan dilakukan penahanan.

Seseorang melakukan kecurangan/*fraud* berdasarkan beberapa motivasi yang bervariasi. Salah satu teori yang menerangkan terkait motivasi seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) adalah *fraud triangle theory*. *Fraud triangle Theory* terdiri atas 3 komponen yaitu *Opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi) yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1953). Teori ini dicetuskan melalui penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 250 narapidana tindak pidana korupsi penelitian ini dilakukan selama lima bulan.

Tekanan (*pressure*) adalah alasan seseorang guna melakukan kecurangan yang disebabkan adanya tekanan, baik tekanan ekonomi ataupun lainnya, disebabkan oleh tekanan organisasi ataupun diri sendiri (Pristiyanti, 2012). Faktor tekanan dapat muncul karena sebuah adanya tanggung jawab ekonomi yang melebihi batas kemampuan yang dapat dipenuhi; hubungan antara organisasi dan pegawainya yang kurang baik dan kompensasi yang tidak sesuai. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan prosedur akan mengakibatkan seseorang mencari tambahan penghasilan dengan cara korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam sektor pemerintahan antara lain kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural.

Kesempatan (*opportunity*) adalah

keadaan yang memungkinkan seseorang atau kelompok dapat melakukan kecurangan (Ruscitasari, 2019) Faktor yang dapat memunculkan kondisi tersebut adalah keefektifan pengendalian internal dan penegakkan peraturan. Pengendalian internal akan memberikan keamanan dan terkendalinya operasional dan kinerja organisasi. Kecurangan yang terjadi juga dipengaruhi oleh peraturan yang dijalankan atau ditegakkan, jika seluruh pihak menegakkan peraturan maka kecurangan tidak akan terjadi (Nurna Pratiwi, 2022)

Rasionalitas (*rationalization*) merupakan tanggapan perilaku kecurangan sebagai akibat dari kesenjangan karakter pribadi karyawan. Rasionalitas menjadi elemen yang pokok dalam melakukan kecurangan karena pelaku mencari sebuah pembenaran untuk dirinya (Najahningrum, 2013). Pada penelitian ini faktor rasionalisasi dihubungkan dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi.

Tindakan seseorang melakukan kecurangan akuntansi berkaitan erat dengan etika (Nurna Pratiwi, 2023) Dalam Bologna (1993) menjelaskan *Fraud* dengan GONE Theory yang terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan yaitu : *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). Teori GONE adalah teori yang menyempurnakan dari teori *Triangle Fraud* yang mengungkapkan tentang faktor-faktor seseorang atau kelompok melakukan kecurangan atau *fraud*.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan (*fraud*), seperti penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum,

(2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kecurangan (*fraud*) dengan menggunakan *fraud triangle theory*. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu antara penegakkan hukum, keefektifan sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terdapat pengaruh negatif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan; antara asimetri informasi terdapat pengaruh positif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan; dan antara budaya etis organisasi tidak dapat pengaruhnya terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Susandra & Hartina, (2017) melakukan penelitian pada dinas daerah kota Bogor yang hasilnya menunjukkan bahwa *Opportunity*, *rationalization*, dan *cullosion* secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*); secara parsial *opportunity* dan *cullosion* berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*); faktor yang berpengaruh dominan terhadap kecurangan (*fraud*) ialah variabel *opportunity*.

Di sektor pemerintahan tidak lepas dari berbagai macam jenis tindak kecurangan yang dapat terdeteksi maupun tidak dan yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi. Maka dari itu pemerintah berupaya melakukan upaya pencegahan, penanganan dan meminimalisirkan tindak kecurangan. Upaya tersebut dengan cara membuat berbagai regulasi untuk menguatkan *control internal*, struktur dan budaya yang baik dalam kelembagaan oraganisasi. *Fraud* biasanya terjadi disebabkan karena lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang lemah, atau penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Dengan adanya faktor-faktor yang melatar belakangi kecurangan, dapat diteliti dan ditelaah sumber penyebabnya. Dari hasil telaah tersebut diharapkan dapat ditemukan dan ditentukan sebuah solusi atau regulasi

yang cocok untuk diterapkan sehingga kecurangan tidak akan terjadi (Pristiyanti, 2012).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kecurangan

#### a. Pengertian Kecurangan

Menurut *Statement of Auditing Standart* No.99 (2002) dalam penelitian Susandra & Hartina, (2017) kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan menyimpang yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan salah saji material. Sedangkan menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (Gigih Aulia Hilmiawan, 2023) kecurangan (*fraud*) adalah hal-hal yang bertentangan dengan aturan untuk suatu tujuan tertentu (mendapatkan keuntungan) yang dilakukan dengan disengaja dan merugikan orang lain dengan cara menutupi kebenaran, licik, berbohong, dan pengelabuan. Menurut *Black Law Dictionary*, kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu keadaan dengan sengaja yang menyebabkan pihak lain dirugikan.

#### Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan

Kecurangan (*fraud*) terjadi di beberapa sektor, salah satunya sering terjadi di sektor pemerintah. Bentuk dari kecurangan di sektor pemerintah biasanya berupa tindak pidana korupsi. Menurut bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu (*corruptio-corruptere*) yang memiliki arti rusak, busuk, menyogok, memutarbalikkan dan menggoyahkan. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara (dalam pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan atau jabatannya sehingga

merugikan negara (dalam pasal 3), dan juga tindakan penyuapan, penggelapan, gratifikasi dan penyuapan.

Tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan yang sering terjadi berupa *mark-up*, penghilangan dokumen dan manipulasi catatan keuangan yang merugikan perekonomian negara. Kecurangan tersebut dilakukan oleh seseorang atau kelompok karena adanya kesempatan dan lemahnya pengendalian internal instansi.

#### Faktor Penyebab Kecurangan (*Fraud*)

##### a. Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi merupakan sesuatu yang sangat berharga dan termasuk tujuan oleh para pegawai dalam suatu perusahaan. Dengan kompensasi tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menutupi tanggungannya. Karyawan yang sudah bekerja sesuai tugasnya berhak untuk mendapatkan gaji atau kompensasi semestinya. Begitu juga bagi perusahaan memiliki kewajiban memberikan kompensasi tersebut sebagai tanda terimakasih dan dorongan atas usaha yang telah di kerjakannya. Dalam Usman, (2017) menyatakan bahwa sebuah kompensasi yang sesuai dan layak kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan semangat dalam bekerja, sehingga karyawan semakin maksimal untuk melakukan tugasnya.

##### b. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merupakan tinjauan yang dibuat oleh pegawai terkait keadilan dalam hal proses atau prosedur organisasi yang akan digunakan pihak manajemen untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Lailiyah, 2016). Keadilan prosedural menyesuaikan pada tingkat keadilan yang dirasakan seorang pegawai terhadap suatu

pengambilan keputusan oleh manajemen. Sebuah Prosedur harus terdapat komponen dalam aturan yang universal.

Dalam Lailiyah, (2016) mengidentifikasi enam aturan pokok dalam keadilan prosedural. Apabila setiap poin aturan tersebut sudah dipenuhi, maka prosedur dapat dikatakan adil. Aturan tersebut antara lain:

- 1) Konsistensi.
- 2) Meminimalisasi bias
- 3) Informasi yang akurat
- 4) Dapat diperbaiki.
- 5) Representatif
- 6) Etis.

#### **c. Keefektifan Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melatar belakangi perkembangan pengendalian internal di Indonesia. Sistem Pengendalian Internal menurut PP SPIP adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Putri & Suartana, 2022) Pengendalian internal merupakan ketentuan yang dilaksanakan manajemen untuk menyerahkan sebuah jaminan atas sasaran perusahaan agar tercapai dan mengurangi tingkat kegagalan terhadap ancaman keamanan informasi. Pengendalian internal dijalankan oleh manajemen, dan

pihak lainnya. Tujuan pengendalian internal adalah memberikan kepastian tentang tiga bagian tujuan golongan yaitu, keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan kepada hukum yang berlaku.

mutlak dan membatasi ruang gerak individu. Penegakkan hukum harus ada sebuah komponen aparatur penegak agar sebuah aturan dapat dengan jelas dipahami dan dilaksanakan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi sebuah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta guna memaparkan kelanjutan peraturan

#### **d. Budaya Organisasi**

Budaya organisasi (*organization culture*) merupakan nilai-nilai yang berpengaruh dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Penyebab kecurangan di organisasi dapat disebabkan oleh perilaku yang tidak wajar terkait sosial budaya sehingga membolehkan segala cara untuk mencapai target atau tujuan. Selain dengan pengendalian internal yang efektif, konsep penting yang dapat mencegah kecurangan adalah menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (Wulandari, 2017).

Kesadaran mengenai adanya *fraud* terhadap pegawai dapat dimasukkan ke dalam suatu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem yang diikuti oleh para anggota suatu organisasi dalam menilai sebuah organisasinya tersebut. Dalam suatu organisasi budaya menguraikan kebiasaannya yang terdapat pada organisasi yang membuat norma perilaku yang harus dilaksanakan oleh anggota.

Setiap organisasi bertanggungjawab

untuk berusaha pengembangan setiap perilaku organisasi yang menggambarkan norma dan etik baik yang dikoordinasikan dengan tertulis dan menjadi landasan oleh seluruh pegawai atau karyawan. Kutur budaya menjadi pondasi yang dapat menumbuhkan nilai-nilai yang dijadikan dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi. Budaya organisasi menjadi salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* apabila budaya tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat mewujudkan budaya yang baik agar organisasi terhindar dari terjadinya *fraud* (Wulandari, 2017).

**e. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan keyakinan seorang terhadap kualitas organisasi, keterlibatan seorang untuk bersedia berusaha dalam organisasi, loyalitas dalam menjaga anggota lain dalam organisasi yang merupakan pernyataan dari pegawai terhadap perusahaannya (Badrut Tamam, 2021). Steers (1985) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan seorang anggota menyatakan kepuasan dan ketertarikannya terhadap nilai-nilai yang ada di perusahaan atau organisasinya. Komitmen organisasi ini adalah nilai pokok dalam sebuah entitas karena menggambarkan sebuah keadaan moral karyawannya yang mempengaruhi kinerja.

***Fraud Triangle Theory***

*Fraud Triangle Theory* yang dicetuskan oleh Cressey sebagai berikut:

**a. Tekanan (*Pressure*)**

Tekanan (*pressure*) merupakan keadaan dimana seseorang memiliki

sebuah tekanan yang menyebabkan melakukan sebuah kecurangan untuk menghilangkan tekanan tersebut (Adinda & Maya, 2015). Tekanan tersebut ada berbagai macam, seperti tekanan keuangan dari keluarga, tanggungan utang, ataupun tekanan non keuangan. *Pressure* (Tekanan) diproksikan dengan adanya variabel pengaruh kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural.

**b. Kesempatan (*Opportunity*)**

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan kondisi dimana seorang pegawai memungkinkan untuk melakukan kecurangan (Hayani, 2021). Kesempatan sebagai otoritas atau kekuasaan seseorang untuk melakukan pengendalian sebuah aset perusahaan atau mengakses suatu aset. Kesempatan menimbulkan seseorang melakukan kecurangan, korupsi, penyalahgunaan dan salah saji.

Menurut Loka et al., (2017) mengungkapkan dari penelitian Cressey, seorang melakukan kecurangan selalu mempunyai kesempatan dan pengetahuan guna melakukan suatu perbuatan supaya tidak diketahui. Menurut Cressey ada dua komponen kesempatan, yaitu:

- 1) *general information* (Informasi atau pengetahuan umum), dari informasi pengetahuan seseorang menjadi yakin terhadap tindakan kecurangan yang dilakukannya.
- 2) *Technical Skill* (Keterampilan teknis) merupakan keahlian seseorang terhadap tindakan kecurangan yang dilakukannya.

Dalam Nurrahmasari, (2020) Kesempatan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu lemahnya pengendalian internal, kontrol

pengawasan yang kurang, kurangnya kedisiplinan, kurangnya pengawasan akses informasi dan kurangnya penilaian kualitas.

**c. Rasionalisasi (*Rationalization*)**

Menurut (Pristiyanti, 2012) Rasionalisasi atau pembenaran merupakan pertimbangan perilaku seseorang yang telah melakukan kecurangan terhadap penalaran moralnya sebagai konsekuensi dari kesenjangan yang terjadi. Rasionalisasi ini diproksikan dengan hubungan antara manajemen dan auditor yang kurang baik dan integritas manajemen. Rasionalisasi menyebabkan seseorang mencari pembenaran dalam kecurangannya tersebut.

Budaya organisasi dan komitmen organisasi dinilai menjadi proksi atau penghubung antara faktor yang mempengaruhi rasionalisasi terhadap kecurangan seorang pegawai. Dalam penelitian (Najahningrum, 2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi akan menjadikan rendahnya terjadinya tindak menyimpang yang dilakukan oleh pegawai.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 yang bertempat satuan kerja perangkat daerah yang menanganangi permasalahan kasus penyalahgunaan keuangan perawatan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang telah diuraikan diatas melalui kuisisioner pada pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Bantul.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai berjumlah 144 yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang akan diteliti adalah 60 pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bantul.

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner merupakan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dirancang dan dicatat oleh peneliti untuk diajukan kepada responden terkait penelitiannya (Hildan, 2019). Penilaian dalam kuisisioner ini dengan menggunakan skala likert 1-5.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM). Teknik model statistik yang dapat digunakan untuk menguji suatu hubungan antara variabel-variabel yang sudah ditetapkan pada suatu pola. Variabel pada *Structural Equation Model* (SEM) ini adalah variabel laten yang dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen (Ginting, 2009).

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan atau menggambarkan variabel-variabel dalam sebuah penelitian (Husna, 2020). Alat statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas identitas responden, seperti nama, jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, dan deskripsi tentang variabel-variabel penelitian yaitu kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, keefektifan pengendalian internal, penegakkan hukum, budaya organisasi dan komitmen organisasi (Fariyah, 2019).

**Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *SmartPLS***

Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan analisis statistik *Partial Least*



*Square (PLS)–structural Equation Modelling (SEM)*, biasanya disingkat dengan PLS-SEM. Pengolahan ini dilakukan untuk menganalisis *patch* (jalur) dengan variabel laten. Model pengukuran dilakukan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan pengujian model struktural dilakukan untuk uji hipotesis dengan model prediksi. Metode *Smart-PLS (Partial Least Square)* teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Outer Model

Analisis outer model dilakukan untuk menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan layak untuk dijadikan model pengukuran validitas dan reliabilitas. Analisis outer model dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Reliability*.

b. Analisis Inner Model

Analisis Inner Model merupakan analisis untuk menguji hipotesis dalam melihat pengaruh antara variabel laten independen dengan variabel laten dependen. Analisis inner model dapat dievaluasi menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter.

b. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian untuk mencapai kesimpulan apakah hipotesis diterima atau tidak terkait pengukuran populasi. Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik, maka alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga standar penerimaan atau penolakan hipotesis adalah ketika t-statistik > 1,96. Dan penggunaan probabilitas untuk menolak atau menerima, maka diterima jika nilai

probabilitas < 0,05 (Hair et al, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa gambar, grafik dan tabel yang mudah dipahami. Hasil hendaknya dibahas secara detail, mengacu pada kepustakaan yang ada di latar belakang.

### Uji Validitas

a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

**Tabel 1.**  
***Outer Loading X<sub>1</sub>***

| Variabel                   | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|----------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Kesesuaian Kompensasi (X1) | X1.1      | 0.866                | Valid |
|                            | X1.2      | 0.859                | Valid |
|                            | X1.3      | 0.784                | Valid |
|                            | X1.4      | 0.815                | Valid |
|                            | X1.5      | 0.832                | Valid |
|                            | X1.6      | 0.795                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Kesesuaian Kompensasi (X1) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel X1 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 2.**  
***Outer Loading X<sub>2</sub>***

| Variabel                 | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|--------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Keadilan Prosedural (X2) | X2.1      | 0.835                | Valid |
|                          | X2.2      | 0.851                | Valid |
|                          | X2.3      | 0.855                | Valid |
|                          | X2.4      | 0.838                | Valid |
|                          | X2.5      | 0.839                | Valid |
|                          | X2.6      | 0.804                | Valid |
|                          | X2.7      | 0.833                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Keadilan prosedural (X2) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7.

Artinya setiap indikator pada variabel X1 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 3.**  
***Outer Loading X<sub>3</sub>***

| Variabel                               | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Keefektifan Pengendalian Internal (X3) | X3.1      | 0.757                | Valid |
|                                        | X3.2      | 0.835                | Valid |
|                                        | X3.3      | 0.782                | Valid |
|                                        | X3.4      | 0.920                | Valid |
|                                        | X3.5      | 0.771                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Keefektifan Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel X1 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 4.**  
***Outer Loading X<sub>4</sub>***

| Variabel              | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------|
| Penegakkan Hukum (X4) | X4.1      | 0.864                | Valid |
|                       | X4.2      | 0.764                | Valid |
|                       | X4.3      | 0.794                | Valid |
|                       | X4.4      | 0.867                | Valid |
|                       | X4.5      | 0.892                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Penegakkan Hukum (X4) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel X1 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 5.**  
***Outer Loading X<sub>5</sub>***

| Variabel          | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|-------------------|-----------|----------------------|-------|
| Budaya Organisasi | X5.1      | 0.780                | Valid |
|                   | X5.2      | 0.930                | Valid |

|      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
| (X5) | X5.3 | 0.718 | Valid |
|      | X5.4 | 0.752 | Valid |
|      | X5.5 | 0.806 | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Budaya Organisasi (X5) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel X1 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 6.**  
***Outer Loading X<sub>6</sub>***

| Variabel                 | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|--------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Komitmen Organisasi (X6) | X6.1      | 0.770                | Valid |
|                          | X6.2      | 0.827                | Valid |
|                          | X6.3      | 0.790                | Valid |
|                          | X6.4      | 0.765                | Valid |
|                          | X6.5      | 0.743                | Valid |
|                          | X6.6      | 0.813                | Valid |
|                          | X6.7      | 0.757                | Valid |
|                          | X6.8      | 0.843                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel Komitmen organisasi (X6) memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel X6 dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 7.**  
***Outer Loading Y***

| Variabel                         | Indikator | <i>Outer Loading</i> | Ket   |
|----------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| Terjadinya Tindak Kecurangan (Y) | Y.1       | 0.738                | Valid |
|                                  | Y.2       | 0.712                | Valid |
|                                  | Y.3       | 0.707                | Valid |
|                                  | Y.4       | 0.789                | Valid |
|                                  | Y.5       | 0.823                | Valid |
|                                  | Y.6       | 0.769                | Valid |
|                                  | Y.7       | 0.819                | Valid |
|                                  | Y.8       | 0.766                | Valid |
|                                  | Y.9       | 0.742                | Valid |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, setiap indikator dari variabel terjadinya tindak kecurangan (Y)

memiliki nilai *Outer Loading* > 0,7. Artinya setiap indikator pada variabel Y dinyatakan valid atau layak. Hal ini berarti semua indikator dapat digunakan penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji *Discriminant Validity* menggunakan nilai dari membandingkan antara nilai akar *Average Variant Extracted* (AVE) dengan korelasi antar variabel. Hasil yang baik adalah jika nilai akar AVE lebih tinggi dari korelasi antar variabel untuk mendapatkan nilai *discriminant validity*. Model yang baik dari setiap indikator yaitu dengan syarat nilai AVE > 0,5.

Berikut adalah nilai AVE dari setiap variabel dalam penelitian ini:

**Tabel 8.**  
**Nilai AVE**

| Variabel | Average variance extracted (AVE) |
|----------|----------------------------------|
| X1.      | 0.682                            |
| X2.      | 0.700                            |
| X3.      | 0.665                            |
| X4.      | 0.702                            |
| X5.      | 0.641                            |
| X6.      | 0.623                            |
| Y.       | 0.583                            |

Sumber: Diolah Oleh Penulis 2023

Berdasarkan hasil tabel diatas, nilai AVE dari masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan yaitu dengan nilai AVE > 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel penelitian telah lulus uji *discriminant validity* dengan baik.

Berdasarkan data dalam tabel 4.22 di atas, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel Kesesuaian Kompensasi (X1), Keadilan Prosedural (X2), Keefektifan Pengendalian Internal (X3), Penegakkan Hukum (X4), Budaya Organisasi (X5),

Komitmen Organisasi (X6) dan Terjadinya Kecurangan (Y) memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator digunakan dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

1) Uji Reliabilitas

a. Analisis Uji Reliabilitas

*Contract Reliability and validity* (reliabilitas dan validitas kontrak) yaitu bagian pengujian nilai reliabilitas indikator pada suatu variabel. Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *contract reliability and validity* dengan menggunakan nilai *cronbach's Alpha* dan *composite reliability*. Data yang memiliki *composite reliability* > 0,7, maka memiliki reliabilitas yang tinggi. *Cronbach's Alpha* yaitu uji reabilitas yang memperkuat nilai *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila terdapat nilai *cronbach's Alpha* > 0,7. Berikut adalah nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini.

**Tabel 9**  
***Composite reliability***

| Variabel                               | Composite reliability |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Kesesuaian Kompensasi (X1)             | 0.928                 |
| Keadilan Prosedural (X2)               | 0.942                 |
| Keefektifan Pengendalian Internal (X3) | 0.908                 |
| Penegakkan Hukum (X4)                  | 0.921                 |
| Budaya Organisasi (X5)                 | 0.898                 |
| Komitmen Organisasi (X6)               | 0.930                 |
| Terjadinya Kecurangan (Y)              | 0.926                 |

Sumber: Data Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,7. Maka dapat dinyatakan bahwa keseluruhan variabel pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hasil nilai *composite reliability* setiap variabel tersebut menunjukkan bahwa kestabilan dan konsistensi instrument cukup baik, sehingga keseluruhan instrument dapat digunakan untuk penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 10.**  
***Cronbach's Alpha***

| Variabel                               | Cronbach's alpha |
|----------------------------------------|------------------|
| Kesesuaian Kompensasi (X1)             | 0.911            |
| Keadilan Prosedural (X2)               | 0.929            |
| Keefektifan Pengendalian Internal (X3) | 0.887            |
| Penegakkan Hukum (X4)                  | 0.905            |
| Budaya Organisasi (X5)                 | 0.880            |
| Komitmen Organisasi (X6)               | 0.917            |
| Terjadinya Kecurangan (Y)              | 0.911            |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7. Maka dapat dinyatakan bahwa keseluruhan variabel pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hasil nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dapat diandalkan (Reliabel) dengan baik, sehingga keseluruhan instrument dapat digunakan untuk penelitian dan dianalisis lebih lanjut.

#### **Analisis Uji Model Struktural atau *Inner Model***

Pengukuran model struktural atau *inner model* dalam penelitian ini diuji menggunakan R-Square dan F-Square.

Tujuan pengujian inner model ini yaitu menguji hubungan antar konstruk, nilai R-Square dan nilai signifikan dari model penelitian. Berikut hasil data yang diperoleh dari penggunaan program *SmartPLS* 4.0 nilai dari R-Square:

#### **a. R – Square**

Nilai R-Square menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisiennya antara angka nol (0) -satu (1). Dapat diartikan bahwa nilai R-Square yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memiliki kemampuan yang kuat dalam memberikan informasi atau pengaruh yang dibutuhkan variabel dependen. Sedangkan nilai mendekati nol (0) berarti variabel-variabel independent memiliki kemampuan memberikan informasi kepada variabel dependen yang terbatas. Berikut adalah tabel nilai R-Square dalam penelitian ini

**Tabel 11.**  
**Tabel R-Square**

| Variabel                  | R-square | R-square adjusted |
|---------------------------|----------|-------------------|
| Terjadinya Kecurangan (Y) | 0.506    | 0.450             |

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah sebesar 0,506 atau 50,6 %. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 50,6 % kemampuan model dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa sebesar 50,6 % motivasi seseorang melakukan tindak kecurangan (*fraud*) terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 49,4 % (100%-50,6%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Artinya 50,6 % perubahan Y dapat

dijelaskan oleh kesesuaian kompensasi (X1), keadilan prosedural (X2), keefektifan pengendalian internal (X3), penegakkan hukum (X4), budaya organisasi (X5) dan komitmen organisasi (X6).

**b. F – Square**

F-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi variabel independent terhadap variabel yang dipegaruhi (dependen). Kriteria f-square adalah apabila nilai f-square 0,02 maka terdapat pengaruh yang lemah dari variabel independent terhadap dependen. Jika nilai f-square 0,15 terdapat efek moderat (sedang), sedangkan nilai f-square 0,35 terdapat efek yang kuat atau besar dari variabel independent terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel nilai f-square dari hasil pengolahan dari menggunakan Smartpls 4.0 dalam penelitian ini :

Sumber: Data Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

Pengaruh variabel Kesesuaian kompensasi (X1), keadilan procedural (X2) dan penegakkan hukum (X4) terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) (Y) sebesar 0,260, 0,481, dan 0,064 yang berarti terdapat efek yang moderat (sedang). Sedangkan variabel lain (X3) keefektifan pengendalian internal, (X5) budaya organisasi dan (X6) komitmen organisasi memiliki nilai sebesar 0,019, 0,014 dan 0,002 yang berarti terdapat efek yang kecil (rendah) terhadap variabel (Y) terjadinya tindak kecurangan (*fraud*).

**Analisis Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis pada *Smart Partial Last Square (Smart PLS)* dapat dilakukan

dengan metode *bootstraping*. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Berikut adalah tabel dari hasil uji hipotesis:

**Tabel 12**  
**Koefisien Jalur**

|      | (O)            | (M )           | (STD EV) | ( O/STD EV ) | P values  |
|------|----------------|----------------|----------|--------------|-----------|
| X 1. | -<br>0.3<br>87 | -<br>0.3<br>65 | 0.117    | 3.306        | 0.0<br>01 |
| X 2. | 0.7<br>20      | 0.6<br>56      | 0.163    | 4.420        | 0.0<br>00 |
| X 3. | 0.1<br>33      | 0.1<br>30      | 0.147    | 0.905        | 0.3<br>66 |
| X 4. | -<br>0.2<br>50 | -<br>0.2<br>28 | 0.165    | 1.517        | 0.1<br>29 |
| X 5. | -<br>0.1<br>17 | -<br>0.0<br>89 | 0.148    | 0.788        | 0.4<br>31 |
| X 6. | 0.0<br>44      | 0.0<br>52      | 0.139    | 0.318        | 0.7<br>50 |

Sumber: data diolah peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil pengujian secara langsung antar variabel menggunakan *SmartPLS 4.0* sebagai berikut:

Uji hipotesis dari Variabel Kesesuaian Kompensasi (X1) dan Keadilan Prosedural (X2) diterima karena nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Artinya kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*).

Sedangkan pada variabel keefektifan pengendalian internal (X3), penegakkan hukum (X4), Budaya organisasi (X5) dan komitmen organisasi (X6) hipotesisnya ditolak karena nilai *p-values* lebih besar dari 0,05 atau > 0,05. Artinya variabel Keefektifan pengendalia internal (X3), penegakkan hukum (X4), budaya organisasi (X5) dan komitmen organisasi (X6) tidak



berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan.

#### **Pembahasan**

#### **Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.22 yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki nilai *P-values* sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dapat menekan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

#### **Keadilan Prosedural Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan**

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.22 yang menunjukkan bahwa keadilan prosedural ( $X_2$ ) memiliki nilai *p-values* sebesar 0,000 berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, keadilan prosedural dapat menekan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan

#### **Keefektifan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan**

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan sehingga  $H_3$  ditolak. Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel keefektifan pengendalian internal ( $X_3$ ) memiliki nilai *p-*

*values* sebesar 0,366 yang berarti bahwa nilai tersebut  $< 0,05$  atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya tindak kecurangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

#### **Penegakkan Hukum Tidak Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan**

Hasil pengolahan data dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa penegakkan hukum tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan, sehingga hipotesis keempat ini ditolak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.22 yang menunjukkan nilai *p-values* variabel penegakkan hukum sebesar 0,366 atau  $> 0,05$  atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dalam menekan tindak terjadinya kecurangan variabel penegakkan hukum tidak berpengaruh.

#### **Budaya Organisasi Tidak Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan**

Komitmen Organisasi (KO) pada pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bantul termasuk kedalam kategori baik. Berdasarkan hasil di lapangan responden menyatakan bahwa mereka bangga dan gembira telah bergabung dan ada dalam organisasi atau instansi tersebut, karena sebuah nilai yang baik dalam instansi. Namun, dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebuah komitmen organisasi tidak terdapat pengaruhnya terhadap terjadinya tindak kecurangan.

#### **SIMPULAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Kesesuaian Kompensasi ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) ( $Y$ ) di sektor pemerintahan.
2. Variabel keadilan Prosedural ( $X_2$ )

berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) (Y) di sektor pemerintahan.

3. Variabel Keefektifan Pengendalian Internal (X3) tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) (Y) di sektor pemerintahan.
4. Variabel Penegakkan Hukum (X4) tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) (Y) di sektor pemerintahan.
5. Variabel Budaya Organisasi (X5) tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) (Y) di sektor pemerintahan.
6. Variabel Komitmen Organisasi (X6) tidak berpengaruh terhadap terjadinya tinder kecurangan (*fraud*) (Y) di sektor pemerintahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda, & Maya, Y. (2015). *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.*
- Aprilianti, L. (2018). Pengaruh Greedy, Opportunity, Need, dan Exposure Terhadap Perilaku Tindakan Korupsi APBD Dengan Parlement Behavior Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada DPRD Kabupaten Polewali Mandar ). In *Repositori Uin Alauddin* (Vol. 3, Issue 2).
- Asih, T. (2020). *Pengaruh greed, opportunity, need, dan exposure terhadap kecurangan akademik dengan religiusitas sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016-2018).* 1–263.
- Badrut Tamam, B. S. (2021). Analisis Biaya Pemasaran pada Prototype Sereal Analog Desa Guwosari dengan Pendekatan Marketing Mix 4P. *Jobdeker*, 92.
- Farihah, E. N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Empiris pada Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bondowoso). *Digital Repository Universitas Jember*.
- Firdaus, M. H. Z. (2018). *KECENDERUNGAN PEGAWAI MELAKUKAN KECURANGAN / FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAHAN ( Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten ) SKRIPSI Oleh : Nama No . Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.*
- Ginting, D. B. (2009). Structural Equation Model Latent.Pdf. *Media Informatika*, 8(3), 121–134.
- Hayani, R. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara).*
- Hukum, D., Peradilan, M., & Februari, I. C. W. (2023). *Latar Belakang.*
- Husna. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada KAP di Kota Medan. *Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
- Gigih Aulia Hilmiawan, N. P. (2023). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa:. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING*, 14.
- Nurna Pratiwi, A. P. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KULONPROGO. *JURNAL AKUNTANSI DEWANTARA* , 59.
- Nurna Pratiwi, A. P. (2023). Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Desa di Kabupaten Kulonprogo. *Akuntansi Dewantara*, 67.
- Ruscitasari, Z. (2019). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 229.
- Studi, P., Sains, M., Pascasarjana, P., & Diponegoro, U. (2010). *Pengaruh karakteristik dewan komisaris independen terhadap manajemen laba*
- Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kecenderungan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Bogor Analysis Factors Influencing Tendency of Fraud There Is Set of Job Peripheral of Area ( Skpd) in Town of Bogor. *Jurnal Akunida*, 3, 63–83.

Usman, S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(2), 1689–1699